

BAB IV

KESIMPULAN

Kebijakan yang diambil pada masa Susilo Bambang Yudhoyono Jusuf Kalla adalah kebijakan yang tidak pro rakyat, bertolak belakang dengan janji pada masa kampanyenya. Kebijakan yang telah diambil dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu adanya elite politik yang bersifat komprador, tekanan dari World Bank dan IMF, intervensi MNC dalam deregulasi undang-undang. Para elite politik yang berada dibalik pengambilan kebijakan tersebut banyak memiliki latar belakang pendidikan dan organisasi yang cenderung berpihak terhadap kepentingan lembaga keuangan dunia dan multi nasional corporation. Padahal dalam setiap kebijakan yang diambil nasib rakyat Indonesia dipertaruhkan. Dapat dicermati dalam penjualan beberapa BUMN yang berprospek baik, ternyata para elite tersebut lebih memilih menjualnya kepada pihak asing. Beberapa peraturan yang dibuat juga memberikan ruang terhadap perusahaan-perusahaan besar untuk dapat menguasai dan mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia, semisal hasil tambang dan pemanfaatan hasil hutan. Rakyat sekitar daerah tambang dan perkebunan milik perusahaan besar tersebut selalu dirugikan, dalam hal merusak alam, pembuangan limbah, perebutan lahan dan masih banyak hal yang lain. Padahal menurut konstitusi apa yang terkandung didalam tanah Indonesia digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat banyak bukan untuk menyengsarakan. Sri Mulyani Boediono dan Aburizal Bakrie adalah beberapa elite politik yang memiliki pengaruh kepentingan dalam menjalankan jabatannya di pemerintahan. Ketiganya memiliki latar belakang pendidikan dan organisasi yang pro barat.

John Perkins dalam bukunya yang berjudul *Confessions of An Economic Hitman* mengatakan bahwa rekayasa ekonomi tengah dilakukan para negara adikuasa untuk melanggengkan tatanan global yang pro-akumulasi modal. Hal ini dilakukan dengan cara

mengecoh pemerintahan dengan utang yang banyak. Mereka menyalurkan dana dari Bank Dunia, *Asian Development Bank* (ADB), dan organisasi bantuan lainnya menjadi dana korporasi raksasa. Dana-dana pinjaman yang begitu besar jumlahnya itu dikucurkan oleh negara kreditor dengan tujuan untuk mencengkeram negara bersangkutan. Akhirnya, negara penerima utang itu menjadi target yang lunak ketika negara kreditor membutuhkan apa yang dikehendakinya, seperti akses yang mudah untuk mengeksplorasi sumber daya alam yang dimiliki negara penerima utang dan perubahan undang-undang penanaman modal asing. Jadi, skenario ini berbicara mengenai kebijakan yang mempromosikan kepentingan korporatokrasi (sebuah bentuk koalisi bisnis dan politik antara pemerintah, perbankan, dan korporasi). Konsep korporatokrasi ini yang membuat pemerintah dalam banyak hal bekerja di bawah tekanan, tunduk kepada, dan sekaligus melayani kepentingan yang lebih besar.

Hal lain yang terlihat jelas adalah mengenai permodalan keuangan dan perbankan yang ternyata lebih banyak dikuasai oleh investor asing dibandingkan dengan investor lokal. Selain itu, dana masyarakat di sektor riil yang berjumlah kurang lebih Rp 210 triliun tidak bergerak karena hanya diletakkan pada sebuah Sertifikat Bank Indonesia. Ratusan triliun rupiah dana utang telah diupayakan untuk mengembalikan perekonomian dan perbankan nasional, namun tidak ada perkembangan signifikan, justru aset dan pendapatan milik negara (lebih tepatnya milik rakyat) tidak dimanfaatkan dengan baik. Untuk tahun 2006 cicilan dan bunga utang sudah lebih dari 30 persen dari besaran APBN atau lebih besar daripada anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Wajar kalau ternyata hal tersebut membuat jumlah orang miskin lebih dari 110 juta orang. Hasil ini memperlihatkan secara mutlak, betapa lemahnya posisi pemerintah saat ini. Sebagian besar roda perekonomian yang berjalan bukan atas kontrol pemerintah, tetapi kontrol dari para pemilik saham yang besar,

milik para pengusaha swasta, para investor asing, dan sebagian investor lokal bukan

Banyaknya kasus yang terjadi pada bangsa ini menyiratkan ketidakpedulian dan kegagalan pemerintah dan sistem birokrasi. Kalkulasi bisnis dan statistik menjadi tujuan utama bagi para elit kekuasaan dan korporat. Keputusan-keputusan yang dibuat pemerintah terlalu banyak mempertimbangkan kepentingan korporat sehingga banyak aspek kehidupan yang mulai terlepas dari proses penyelesaian masalah bangsa ini. Rakyat Indonesia tengah menuju suatu era korporatokrasi, dimana kesejahteraan karyawan dan masyarakat lebih mungkin dikerjakan korporasi dibandingkan negara. Terlihat jelas, pemerintah memang bekerja di dalam tekanan pihak-pihak luar yang memainkan berbagai peran kepentingan. Pemerintah sepertinya tidak terusik sama sekali dengan hal ini, padahal, satu per satu tanpa kita sadari, aset rakyat di bumi pertiwi ini mulai lepas. Perusahaan-perusahaan yang bertaraf nasional dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia mulai lepas dari tangan kita. Bahkan beberapa perusahaan milik Negara yang prospektif dilepaskan kepada pihak asing. Atas nama globalisasi, kita menerimanya sebagai hal yang wajar. Kasus lumpur Lapindo memberikan kita pelajaran, bahwa langkah pemerintah untuk bertindak kurang tegas seolah memberi ruang tersendiri bagi rekayasa jual-beli antar perusahaan, tidak lain untuk menunjukkan perusahaan (korporasi) memiliki kekuatan yang kuat dibanding pemerintah. Kecenderungan korporasi akan memperlemah kemampuan pihak luar, dalam membatasi atau mengontrol kegiatannya, seharusnya kita sadari. Agen-agen korporat melalui lobi-lobi tingkat tinggi, dengan memanfaatkan jaringan media pembentuk opini publik, akan memengaruhi berbagai peraturan, agar hasilnya tetap berpihak pada kepentingan mereka. Iklim politik dan birokrasi publik yang diwarnai mobilitas vertikal yang mahal, pasar-pasar lobi menjadi menjamur. Dalam kondisi demikian, pengusaha merupakan sumber dana politik yang andal, dan tukar menukar konsesi menjadi hal yang lazim. Seandainya kita tidak berusaha menyikapi hal tersebut secara bijaksana, maka tinggallah waktu yang akan memberikan keputusan pada bangsa ini bagaimana arah bangsa ini di kemudian hari. Secara perlahan namun pasti bangsa

menyesakkan dada ini. Dalam hal ini, pernyataan Sudi Silalahi ini dinilai oleh J. Kristiadi selaku pengamat senior CSIS sebagai sebuah politik kepura-puraan yang penuh aksesoris dan polesan karena pada kenyataannya rakyat umum tidak merasakan keberhasilan yang diklaim itu. Menurut dia, pemerintah SBY terlalu banyak memiliki noda hitam yang tidak dilihat atau diakui dengan klaim keberhasilannya.

Siaran Pers GAPRI Gedung Perpustakaan Nasional, 22 Januari 2008 Selama tiga tahun pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono & Jusuf Kalla (SBY-JK) terbukti gagal dalam menanggulangi kemiskinan. Indikasi tersebut didasarkan pada tingkat capaian target penanggulangan kemiskinan dalam dokumen RPJM yang menjadi aktualisasi visi-misinya. Dokumen tersebut menyatakan bahwa selama 5 tahun, pemerintahan SBY-JK akan menurunkan jumlah penduduk miskin dari 16,66 persen (36,10 juta jiwa) di tahun 2004 menjadi 8,9 persen pada tahun 2009. Hanya saja, hingga tahun ketiga RPJM, jumlah penduduk miskin masih berjumlah 16,68 persen atau 37,17 juta jiwa. Padahal menurut RPJM jumlah penduduk miskin tahun 2007 seharusnya berjumlah 11,6 persen atau sekitar 26 juta jiwa. Artinya sejak tahun 2004 jumlah penduduk miskin tidak menurun, melainkan semakin bertambah, baik secara relative maupun absolut. Secara umum, kegagalan ini disebabkan karena pemerintahan SBY-JK tidak memiliki keberpihakan dan ketegasan sikap dalam menihilkan kaum miskin. RPJM telah menegaskan bahwa masalah kemiskinan adalah masalah pemenuhan hak dasar warga negara. Namun, alih-alih memperbesar belanja sosial bagi pemenuhan hak-hak tersebut pemerintahan SBY-JK masih berkitat pada pendekatan stabilisasi makro.